

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

7.1.1. Komponen Input

7.1.1.1. Kebijakan

Dasar Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) ditetapkan melalui Surat Keputusan MENKES/SK/II/1981. Kebijakan itu tidak dilanjutkan dengan penegasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, karena tidak ditemukan bukti adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan sistem informasi kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Tidak ada kebijakan tertentu yang dapat dijadikan pedoman bersama mengenai sistem informasi kesehatan, sehingga terjadi perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan kegiatan di lapangan. Perbedaan itu meliputi batas waktu pengiriman laporan karena masing-masing Puskesmas mempunyai kesepakatan tersendiri untuk itu. Di Dinas Kesehatan pun belum ada batasan tegas tentang batas terakhir penyampaian laporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan, sehingga penanggung jawab Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan hanya menunggu penyampaian laporan dari Puskesmas.

Perbedaan lain tidak adanya ketentuan petugas yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan tersebut, bahkan ada Puskesmas yang menugaskan petugas dari program lain untuk merangkap sebagai penanggung jawab sistem informasi kesehatan. Hal inilah yang menyebabkan tidak semua Puskesmas melakukan pengolahan data sebelum disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.

7.1.1.2. Tenaga

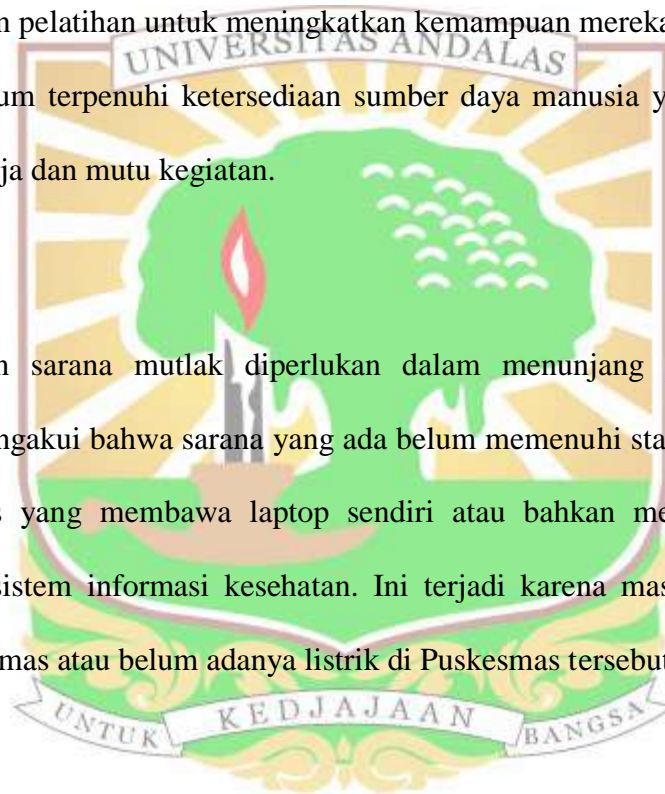
Tidak ada tenaga khusus penanggung jawab sistem informasi kesehatan atau SP2TP di Puskesmas. Semuanya merangkap dengan jabatan lain, karena pimpinan Puskesmas menganggap bahwa kegiatan penanggung jawab sistem informasi kesehatan itu hanya merupakan bagian kecil sehingga tidak memerlukan petugas khusus. Tidak ada spesifikasi pendidikan khusus karena siapa saja dapat menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut. Semua penanggung jawab sistem informasi kesehatan atau SP2TP di Puskesmas belum pernah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pencatatan dan pelaporan. Belum terpenuhi ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan kinerja dan mutu kegiatan.

7.1.1.3. Sarana

Kelengkapan sarana mutlak diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan petugas. Semua mengakui bahwa sarana yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan. Masih ada petugas yang membawa laptop sendiri atau bahkan menyewa warnet untuk mengetik laporan sistem informasi kesehatan. Ini terjadi karena masih kurangnya jumlah komputer di Puskesmas atau belum adanya listrik di Puskesmas tersebut.

7.1.1.4. Dana

Walaupun Puskesmas mempunyai anggaran karena sudah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi tidak ada anggaran khusus mengenai sistem informasi kesehatan. Hal ini disebabkan karena sistem informasi kesehatan belum dimasukkan sebagai suatu kegiatan tersendiri sehingga dana yang diperlukan masih melekat pada kegiatan lain.



7.1.1.5. Metode

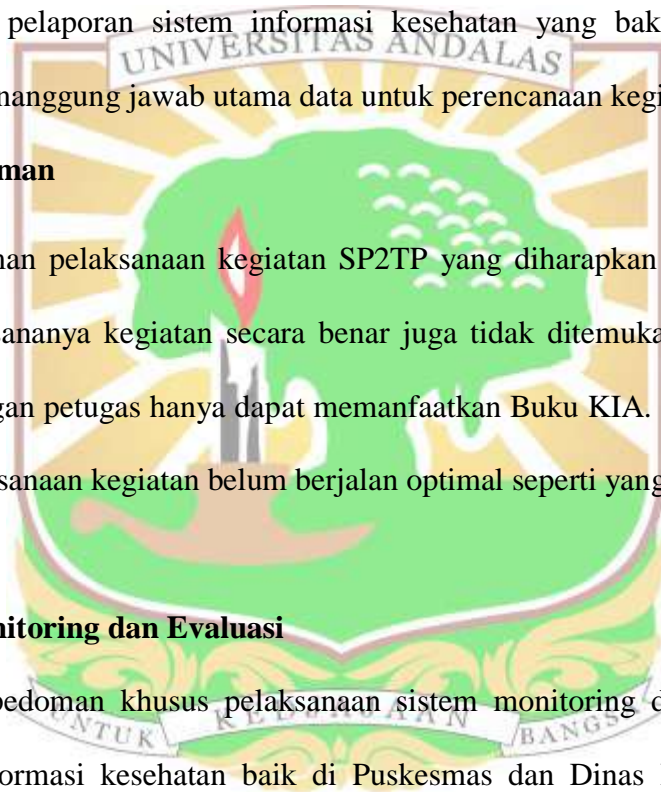
Belum ada metode yang sama dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan antar Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Masing-masing Puskesmas melaksanakan metode dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan petugas yang ada. Tidak ada alur yang sesuai dengan alur pelaksanaan sistem informasi kesehatan yang baku. Hal ini disebabkan tidak ada kebijakan tentang pelaksanaan sistem informasi kesehatan baik di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Hendaknya Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh Pimpinan Puskesmas melaksanakan alur pelaporan sistem informasi kesehatan yang baku dengan melibatkan Bappeda sebagai penanggung jawab utama data untuk perencanaan kegiatan daerah.

7.1.1.6. Buku Pedoman

Buku pedoman pelaksanaan kegiatan SP2TP yang diharapkan ada sebagai petunjuk manual agar terlaksananya kegiatan secara benar juga tidak ditemukan. Sebagai alat bantu pencatatan di lapangan petugas hanya dapat memanfaatkan Buku KIA. Semua hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal seperti yang diharapkan.

7.1.1.7. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Tidak ada pedoman khusus pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi sehingga kegiatan sistem informasi kesehatan baik di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan karena kegiatan sistem informasi kesehatan belum mempunyai penanggung jawab khusus serta belum dianggap sebagai kegiatan tersendiri yang memerlukan monitoring evaluasi.



7.1.2. Komponen Proses

7.1.2.1. Perencanaan

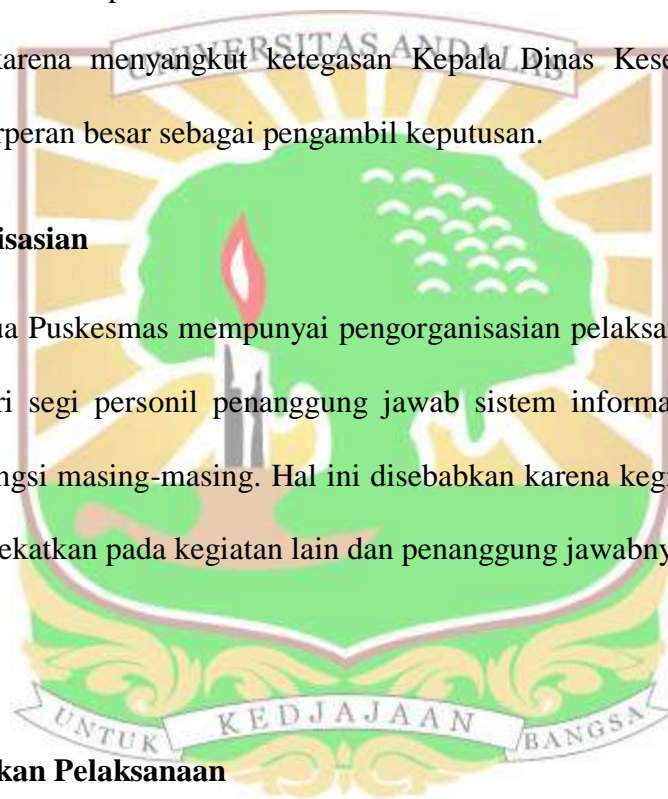
Perencanaan belum dilakukan secara optimal, lebih banyak disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebabkan karena data yang didapatkan dari pelaksanaan sistem informasi kesehatan belum mencukupi atau belum dianalisis sehingga belum dapat dipakai untuk perencanaan kegiatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan selanjutnya. Perencanaan khusus untuk pelaksanaan sistem informasi kesehatan belum dapat dilakukan secara maksimal karena menyangkut ketegasan Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan Puskesmas yang berperan besar sebagai pengambil keputusan.

7.1.2.2. Pengorganisasian

Belum semua Puskesmas mempunyai pengorganisasian pelaksanaan sistem informasi kesehatan, baik dari segi personil penanggung jawab sistem informasi kesehatan maupun tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal ini disebabkan karena kegiatan sistem informasi kesehatan masih dilekatkan pada kegiatan lain dan penanggung jawabnya juga dirangkap oleh petugas lain.

7.1.2.3. Penggerakkan Pelaksanaan

Walaupun semua pihak sudah mengetahui tujuan pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan tetapi tetap belum tercapainya data KIA yang berkualitas secara optimal. Hal yang dapat mengurangi kinerja adalah kurangnya dorongan atau motivasi pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.

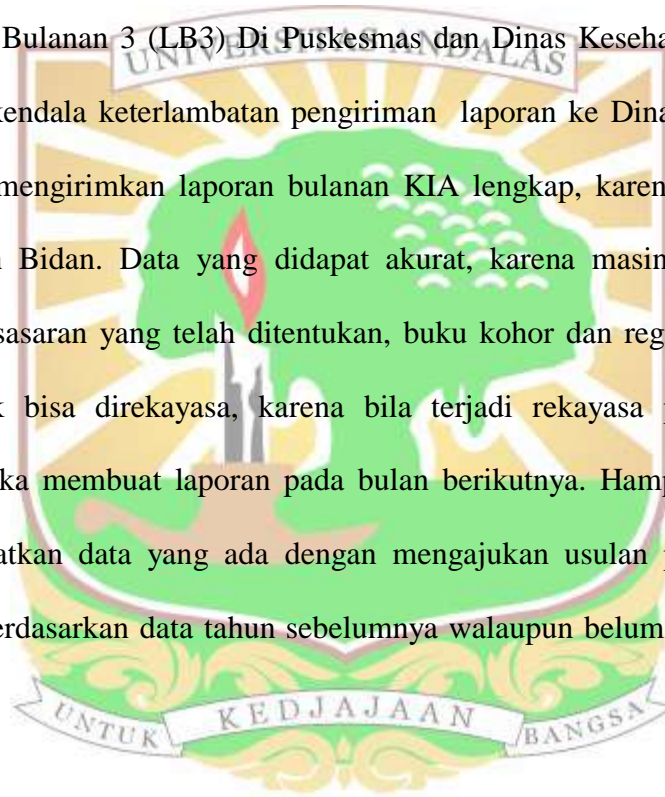


7.1.2.4. Pengawasan dan Pengendalian

Secara keseluruhan proses pengawasan dan pengendalian belum berjalan secara optimal. Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan Puskesmas belum melaksanakan pengawasan dan pengendalian dengan baik.

7.1.3. Komponen Output

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak Laporan Bulanan 3 (LB3) Di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok masih mengalami kendala keterlambatan pengiriman laporan ke Dinas Kesehatan. Hampir semua Puskesmas mengirimkan laporan bulanan KIA lengkap, karena 94% dari informan Bidan Desa adalah Bidan. Data yang didapat akurat, karena masing-masing bidan desa mempunyai target sasaran yang telah ditentukan, buku kohor dan register kunjungan. Data yang didapat tidak bisa direkayasa, karena bila terjadi rekayasa pada bulan ini akan menyusahkan mereka membuat laporan pada bulan berikutnya. Hampir semua Puskesmas berusaha memanfaatkan data yang ada dengan mengajukan usulan perencanaan kegiatan tahun berikutnya berdasarkan data tahun sebelumnya walaupun belum berjalan seperti yang diharapkan.



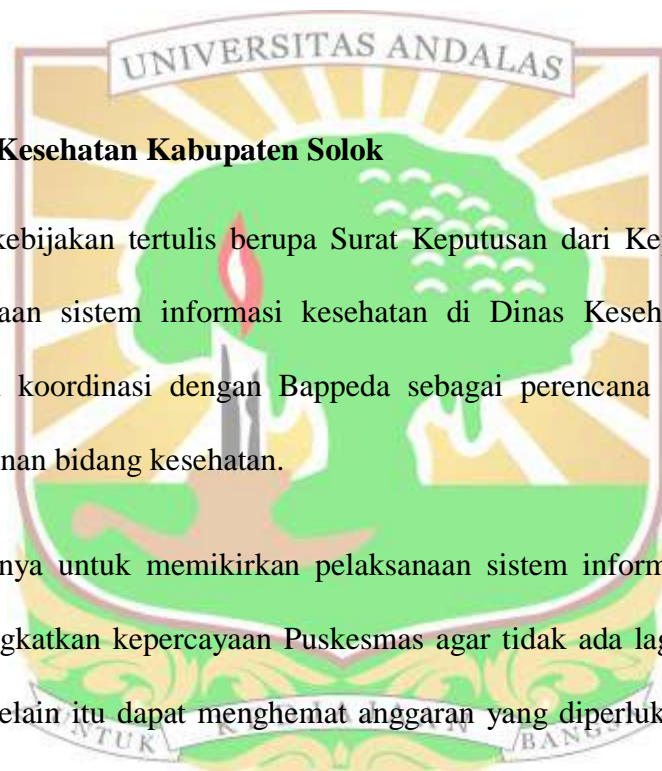
7.2. Saran

7.2.1. Bagi Puskesmas Kabupaten Solok

7.2.1.1. Perlu ada kebijakan tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan dan atau Pimpinan Puskesmas mengenai pelaksanaan sistem informasi kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Isi kebijakan meliputi dasar pelaksanaan, tujuan, penanggungjawab, alur kegiatan dan monitoring evaluasi.

7.2.1.2. Perlu diangkat tenaga penanggung jawab sistem informasi kesehatan/ SP2TP yang kompeten, memberikan pelatihan secara berkesinambungan serta melengkapi sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatannya. .

7.2.1.3. Sistem informasi kesehatan di Puskesmas hendaknya dilakukan satu pintu, dan tenaga Penanggung jawab sistem informasi kesehatan/ SP2TP bukan hanya sekedar megumpulkan data, tetapi dapat juga memahami data yang ada dan dapat memberikan penjelasan kepada pihak lain yang membutuhkan data tersebut.



7.2.2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok

7.2.2.1. Perlu ada kebijakan tertulis berupa Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kesehatan mengenai pelaksanaan sistem informasi kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, termasuk kebijakan koordinasi dengan Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah termasuk pembangunan bidang kesehatan.

7.2.2.2. Sudah saatnya untuk memikirkan pelaksanaan sistem informasi kesehatan *online*, karena dapat meningkatkan kepercayaan Puskesmas agar tidak ada lagi data yang hilang di Dinas Kesehatan. Selain itu dapat menghemat anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem informasi kesehatan seperti anggaran untuk biaya kertas dan cetak serta biaya transportasi petugas dan BBM untuk mengantarkan laporan ke Dinas Kesehatan. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan menganggarkan secara bertahap untuk masing-masing Puskesmas. Membutuhkan biaya yang cukup besar tetapi dengan melihat manfaat yang akan dihasilkan perlu advokasi Kepala Dinas Kesehatan kepada TAPD dan Legastif untuk dapat menyakinkan perlunya diadakan secara bertahap sesuai kondisi keuangan daerah.

7.2.2.3. Perlu diangkat tenaga penanggung jawab sistem informasi kesehatan/ SP2TP yang kompeten, memberikan pelatihan secara berkesinambungan serta melengkapi sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatannya

7.2.2.4. Perlu dukungan dan komitmen dari Dinas Kesehatan agar terselenggaranya pelaksanaan sistem informasi kesehatan khususnya laporan bulanan KIA yang berkualitas dengan selalu memberikan umpan balik berupa evaluasi terhadap laporan yang diberikan yang dapat disampaikan pada setiap pertemuan bulanan Pimpinan Puskesmas atau pemegang program KIA. Umpan balik yang diberikan dapat berupa ketepatan penyampaian laporan, ketepatan data yang disampaikan dan beberapa hal lainnya.

7.2.2.5. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan Puskesmas dengan mengadakan pertemuan rutin Pimpinan Puskesmas dan pemegang program KIA sekaligus sebagai upaya motivasi bagi Puskesmas untuk bekerja lebih baik.

7.2.3 Bagi Peneliti Lain

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti salah satu aspek yang berperan penting bagi tercapainya pelaksanaan sistem informasi kesehatan yang optimal, terutama mengenai faktor-faktor yang termasuk dalam input kegiatan.

